

BAB I

PENDAHULUAN

Melalui penelitian yang berjudul peran militer dalam kegagalan Demokratisasi Mesir 2011-2013, penulis akan berusaha menjelaskan tentang faktor yang mendasari militer masuk di dalam politik Mesir. Mengingat bahwa kekuasaan militer yang sudah terbentuk dari saat jatuhnya Raja Farouk oleh kudeta militer membuat kekuasaannya tidak tergantung dalam beberapa dekade hingga pada akhirnya kepemimpinan militer rezim Husni Mubarak berakhir dan untuk pertama kalinya Pemilihan Umum yang dilakukan secara demokratis diadakan di Mesir.

A. Latar Belakang

Mesir merupakan negara dengan serangkaian sejarah panjang yang membangunkannya. Pergolakan yang terjadi di dalam negeri telah menjadi bagian dari sejarah yang mengubah sejumlah tatanan pemerintahan Mesir. Berbagai pihak juga turut andil dalam perjalanan Mesir ini, salah satunya adalah kelompok militer. Militer Mesir, merupakan salah satu badan militer yang terkuat di kawasan Timur Tengah. Kehadiran kelompok militer membawa suatu keunikan tersendiri dalam pemerintahan Mesir. Keunikan ini disebabkan oleh kemampuan militer untuk bertahan dan menguasai pemerintahan Mesir selama beberapa periode kepemimpinan.

Momentum penting yang mengawali kepemimpinan militer di Mesir adalah pada saat terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Raja Farouk pada Juli 1952. Kudeta ini dilakukan oleh para perwira militer yang tergabung dalam *The Free Officers* atau Organisasi Perwira Bebas dibawah pimpinan Gamal Abdul-Nasser. Militer Mesir memegang peranan penting dalam situasi perpolitikan saat itu. Tugas-tugas militer juga bukan hanya sebagai aparaturnegara dalam menjaga keamanan, tapi juga berperan dalam berbagai kebijakan politik. Para

perwira tersebut kemudian membentuk Dewan Komando Revolusi (RCC), yang pada akhirnya mengubah bentuk negara Mesir (Widyarsa, 2012: 275).

Mesir modern ini mengalami pergulatan sosial-politik yang panjang. Mesir mengalami pergantian rezim berkali-kali karena didasarkan pada ketidakstabilan pemerintahan dan politiknya. Pemimpin yang mengusung gaya diktator dalam mengelola kekuasaan, menimbulkan masalah kesenjangan sosial yang timpang antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat dan gejolak politik internal yang ada di dalamnya. Merebaknya ketidakadilan ekonomi yang berimbas pada meluasnya kemiskinan dan pengangguran, serta terjadinya korupsi. (Richard N. Haass, 2011) Hal ini berdampak kepada rakyat Mesir yang harus menata kembali kehidupannya lalu membangun kembali perekonomian yang sempat terpuruk. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi politik sosial Mesir yaitu adanya intervensi dari negara lain, sebagaimana diketahui, wilayah di Timur Tengah merupakan kawasan yang berkaitan erat dengan Amerika Serikat begitu juga dengan Mesir. Amerika Serikat mencoba mempertahankan kekuasaan dan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. (Mohammad Safari, 2003) Fenomena pergolakan politik ini membawa nasib setiap negara di Timur Tengah yang mengalaminya menuju suatu kondisi revolusi, seperti halnya pada revolusi Mesir pada tahun 2011 untuk meruntuhkan kekuasaan rezim Husni Mubarak.

Mubarak dikenal seorang pembantu setia Presiden Mesir Anwar Sadat. Mubarak diangkat menjadi Wakil Presiden pada 1975 setelah pangkatnya naik di jajaran Angkatan Udara Mesir. Suatu posisi penting dan jabatan strategis yang diraih setelah menjabat sebagai petinggi Angkatan Udara Mesir. Husni Mubarak pernah pula berkarier dan menjabat sebagai deputi menteri pertahanan. Jejak karier Husni Mubarak yang berlatar belakang militer ini memperkokoh rezim kepemimpinannya. Sejak itu

Mubarak memainkan peranan penting di Mesir dan mulai membangun hubungan dengan negara-negara barat. Pada 1981, Anwar Sadat dibunuh, Mubarak naik menjadi orang nomor satu di Mesir. Mubarak merupakan Presiden Mesir kelima untuk masa jabatan lebih dari 30 tahun sejak menjabat pada tahun 1981.

Sejak awal kepemimpinannya, Mubarak menganut sistem otoritarianisme. Sistem otoritarianisme yang diterapkan Mubarak adalah pemerintahan yang sewenang-wenang menggunakan hukum dengan segala instrument negara untuk memonopoli kekuasaan dan menolak hak-hak politik kelompok lain untuk meraih kekuasaan. Husni Mubarak di Mesir menerapkan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 162 Tahun 1958. Poin dari Undang-Undang tersebut adalah kekuasaan polisi diperpanjang, hak konstitusional ditanggihkan, mensensor segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur kebebasan berpendapat, dan pemerintah dapat memenjarakan individu tanpa batas waktu dan tanpa alasan. (Tamburaka, 2011, pp. 105-106) Mubarak menggunakan UU Darurat itu untuk membatat habis lawan-lawan politik salah satunya Ikhwanul muslimin yang merupakan kubu terkuat yang memiliki potensi mengancam kedudukannya. UU itu memberi wewenang ekstra luas bagi polisi untuk menangkap, menahan, dan menyiksa seseorang yang diduga akan melawan pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Selain menggunakan tangan besi dan menjalankan pemerintahannya yang tidak demokratis, Mubarak mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat sejak terlibat langsung dalam *Perjanjian Camp David* yang membuat Mubarak menghadapi situasi yang sulit ketika teriolasi dari dunia Arab karena melanggar melakukan perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*).

Akan tetapi hubungan yang terjalin dengan negara barat membuat Mesir tidak terlalu merasa dirugikan karena selalu mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Faktor inilah yang membuat Mubarak “tahan banting”

dalam menanggapi setiap permasalahan yang mengusik kekuasaanya.

Kejenuhan masyarakat yang tidak terbeleng lagi menciptakan sebuah gerakan revolusi yang terjadi di Mesir. Revolusi tersebut akibat dari ketidakpuasan rakyat akan ketidakmampuan pemerintahan Presiden Husni Mubarak dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya akses dalam menyampaikan aspirasi. (Tamburaka, 2011, p. 69) Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya gerakan tersebut, yaitu adanya gerakan revolusi sebelumnya yang sudah terjadi di Negara Tunisia. Revolusi yang disebut dengan Revolusi Melati tersebut mencapai sebuah keberhasilan hingga rezim Ben Ali turun dari jabatannya. Hal ini selain menjadi faktor yang menginspirasi rakyat Mesir, juga merupakan waktu yang tepat untuk menjatuhkan rezim diktator yang sedang berkuasa karena kondisi Timur Tengah yang Negara-negaranya memiliki karakter kepemimpinan yang tidak jauh berbeda sedang dilanda krisis politik.

Pada 25 Januari 2011 terjadi demonstrasi massa yang berpusat di Tahrir Square. Semua elemen masyarakat bersatu untuk perubahan sistem pemerintahan Mesir yang lebih baik. Elemen tersebut bukan hanya berasal dari satu kelompok (Islam), tetapi terdiri dari kubu Muslim, Kristen, dan sekuler Mesir saling bergandengan tangan untuk menurunkan Mubarak dari jabatannya. Serangkaian demonstrasi pun di lakukan secara masif dan eksplosif dalam bentuk aksi maupun bentuk protes lewat media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam revolusi yang tengah bergolak di Mesir. Media digital jelas-jelas menjadi pilihan sarana menggulingkan pemerintahan diktator tanpa perlu takut ketahuan, karena kebanyakan diktator tidak memiliki strategi media sosial. (Philip Howard, 2011) Selama masa kepemimpinan Mubarak, berbagai aksi demonstrasi yang menentang pemerintahan selalu dilarang dan bahkan dilawan dengan

sikap represif aparat keamanan. Demonstrasi secara besar-besaran ini yang berlangsung selama 18 hari ini berhasil meruntuhkan kekuasaan Husni Mubarak dari kursi kepresidenan ketika Mubarak secara resmi menyatakan mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 dan Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata mengambil alih kekuasaan karena dalam kondisi darurat dan berjanji akan mencabutnya setelah situasi kembali normal. (Huriyah, 2015)

Pasca jatuhnya Mubarak, keberadaan pembangunan dan penguatan demokrasi di Mesir masih rancu. Ada beberapa hal yang menghambat perkembangan demokrasi pasca Mubarak yang perlu diperhatikan yaitu, (1) masih kuatnya keberadaan pengaruh rezim Mubarak khususnya para pengikut yang masih loyal terhadap Mubarak, (2) pemerintah yang mengendalikan birokrasi Mesir merupakan loyalis Mubarak dan pemerintahan transisi yang menjabat merupakan loyalis Mubarak.

Terlepas dari itu, Mesir langsung mengadakan pemilihan umum untuk menentukan presiden terpilih. Pemilihan umum Mesir sendiri berjalan dalam dua putaran. Pada putaran pertama Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq berhasil mengungguli calon-calon lainnya sehingga berhak maju ke putaran kedua. Pada putaran kedua, Muhammad Mursi yang berasal dari Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang didirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 2011, akhirnya mengalahkan Ahmad Syafiq (independen) dan berhak menjadi Presiden Mesir selanjutnya.

Komisi Pemilihan Umum pada 25 Juni 2015 mengumumkan Muhammad Mursi sebagai presiden terpilih Mesir. Mursi menang dengan 51,8% dukungan dengan total perolehan 13.230.131 suara, mengalahkan Shafiq yang mendapat suara sebanyak 48,3% atau 12.347.380 suara dari lebih 50 juta warga Mesir yang memiliki hak untuk memberikan suara. (Hidriyah, 2015) Mursi merupakan presiden kelima Mesir dan presiden sipil

pertama yang dipilih lewat pemilihan umum secara bebas dan demokratis. Pemilihan Mursi tidak lepas dari keterlibatan Ikhwanul Muslimin yang sempat dibungkam pada masa pemerintahan Mubarak tersebut merupakan organisasi berbasis Islam yang berdiri pada tahun 1928 di Mesir yang mana Mursi merupakan politisi elit dari kelompok tersebut. Babak baru demokratisasi Mesir setelah Presiden Husni Mubarak tersingkir lewat gerakan demonstrasi yang memakan ratusan korban jiwa.

Mursi merupakan Presiden pertama yang dipilih secara demokratis dan Mursi bukan dari kalangan militer. Cukup meyakinkan masyarakat bahwa diawal kepemimpinan baru, sosok Mursi bisa membawa Mesir kearah yang lebih demokratis tidak seperti rezim kepemimpinan sebelumnya.

Pada Kamis 22 November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Mursi mempunyai otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Dekrit tersebut memberikan perlindungan hukum bagi parlemen, perlindungan kepada para politisi yang duduk di majelis tinggi yang didominasi oleh golongan Ikhwanul Muslimin. (Kawilarang, 2012) Dekrit tersebut dibuat karena militer melalui SCAF membubarkan parlemen yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan situasi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok Mursi. Dekrit tersebut menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa Mursi dituding menumpuk kekuasaan, ingin menjadi diktator baru yang sama seperti Mubarak hanya dengan cara dan wajah berbeda. (Kuncahyono, 2013) Terlihat sangat mencolok kebijakan yang diambil Mursi untuk mengarahkan syariat islam sebagai sumber hukum tertinggi di Mesir dengan meningkatkan popularitas golongannya yaitu Ikhwanul Muslimin. Selain itu, dekrit Presiden 22 November 2012 yang menyatakan bahwa segala keputusan Mursi melebihi hukum legal sampai

parlemen baru terpilih memicu kemarahan kubu oposisi dan rakyat. (Republika.co.id, 2012)

Pada tanggal 30 Juni 2013 demonstrasi besar terjadi untuk menggulingkan Mursi pada ulang tahun pertama kekuasaannya yang bergolak. Pada akhirnya tanggal 3 Juli pengumuman penggulingan Mursi disampaikan oleh Kepala Staf Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah Al-Sisi di televisi nasional dan mengangkat Adly Mansour sebagai Presiden sementara.

Dinamika politik Mesir yang mengalami pasang surut ini diawali dari revolusi rakyat Mesir terhadap pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Husni Mubarak. Revolusi yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah tersebut terinspirasi dari revolusi sebelumnya yang terjadi di Tunisia. Fenomena *Arab Spring* ini tidak hanya menyebar di satu Negara, akan tetapi menyebar di hampir semua kawasan Timur Tengah. Gerakan yang dinamakan Revolusi Melati tersebut berhasil meruntuhkan kekuasaan rezim otoriter Mubarak yang berlatar belakang militer sampai pada akhirnya Mesir melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kali yang di pilih secara demokratis.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: *“Peran Militer Dalam Kegagalan Demokratisasi Mesir 2011-2013”*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa aja yang ingin kita cari jawabannya. Dengan berdasarkan hasil uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana peran militer dalam kegagalan demokratisasi di Mesir tahun 2011-2013? “**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu permasalahan sekaligus menjawab penelitian di atas, memerlukan adanya kerangka berpikir. Kerangka pemikiran itu terdiri dari teori dan konsep. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. (Mas'ood, 1994, hal. 218) Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau Fenomena. (Mas'ood, 1994, hal. 109) Kedua hal tersebut yang menjadi acuan dan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Pada penelitian ini akan menggunakan teori Intervensi Militer.

1. Intervensi Militer

Intervensi militer didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan lintas batas negara dan organisasi regional dengan ukuran-ukuran keadilan dan alasan-alasan bagi aksi mereka, seolah-olah dalam rangka untuk memulihkan perdamaian dan keamanan, serta untuk mengakhiri penderitaan fisik dan pelanggaran HAM yang semakin meluas, dengan dukungan multilateral tetapi tanpa dengan persetujuan negara yang akan diintervensi. (Eniayejuni, 2017)

Intervensi militer diartikan ketika militer masuk, berpartisipasi, mempengaruhi kebijakan politik baik secara langsung atau tidak. Menurut S. F. Finer terjadinya intervensi militer disebabkan oleh faktor internal militer tersebut yang ditujukan sebagai berikut:

“...melihat internal militer sebagai faktor utama terjadinya intervensi. Faktor motivasi biasanya sangat berpengaruh besar apakah militer akan memengintervensi atau tidak. Faktor ini mencakup beberapa motivasi antara

lain; kepentingan nasional, kepentingan kelompok yang meliputi kepentingan kelas, dan kepentingan individu.” (Finner, pp. 20-54)

Militer terlibat hampir di semua fase yang terjadi negara Mesir. Fase pertama militer pasca revolusi, dimana peran militer di fase ini adalah menduduki kekuasaan sementara yang terjadi akibat revolusi mesir dan kekosongan presiden, tetapi peran yang di tunjukkan oleh militer Mesir yang memposisikan dirinya sebagai kekuasaan superioritas yang hanya membawa kepentingan kelompoknya.

Fase kedua yaitu, dilaksanakannya pemilu yang mana merupakan titik terang transisi demokrasi di Mesir. Pelaksanaan pemilu di Mesir merupakan bentuk pemenuhan janji atas tuntutan masyarakat yang sudah memakan korban jiwa. Pemilihan umum yang sempat tertunda oleh pihak militer tersebut menunjukkan bahwa militer mengikutsertakan dirinya dalam urusan politik yang mengakibatkan tidak berjalan demokrasi yang baik ataupun dapat di katakan demokrasi yang gagal.

Dan fase ketiga yaitu, faktor dekrit presiden yang dikeluarkan Mursi sebagai perlindungan hukum dan monopoli kekuasaan yang tadinya pemerintahan Mesir didominasi kaum militer lalu digantikan oleh kalangan Ikhwanul Muslimin membuat masyarakat memandang bahwa Mursi ingin menjadikan dirinya sebagai diktator baru. Sehingga masyarakat dan kubu oposisi ingin menuntut mundur presiden Mursi.

Menurut Amos Perlmutter intervensi militer terjadinya faktor eksternal ada dua kondisi yaitu kondisi sosial dan politik suatu Negara itu sendiri.

Pertama kondisi sosial. Dalam suatu Negara yang kondisi sosialnya lemah, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi tinggi. Ketika struktur lemah makan institusi tidak berjalan secara

efektif.

Kedua kondisi politik. Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan sipil.

Dalam penelitian ini, terjadinya intervensi militer tidak terlepas dari dukungan dari pihak asing. Intervensi mengacu pada tindakan aktor eksternal yang mempengaruhi keadaan domestik suatu Negara berdaulat (Nye, p. 134) Krisis politik yang dialami pemerintahan Muhammad Mursi semakin melemah disebabkan karena tuntutan masyarakat yang tidak terpenuhi dan ekonomi memburuk. Demonstrasi besar-besaran dari kubu oposisi untuk menjatuhkan rezim Mursi dimanfaatkan kubu militer sebagai momentum untuk menurunkan Mursi dari kursi kepresidenan. Tindakan militer tersebut mendapat dukungan oleh Amerika Serikat dalam bentuk dukungan politik dan ekonomi untuk menjaga kepentingannya di Mesir.

D. Hipotesa

Militer berperan dalam kegagalan demokratisasi di Mesir dengan cara :

1. Militer memberi ultimatum kepada presiden untuk segera menuruti tuntutan masyarakat. Demi menjaga kepentingan masyarakat, militer akan memberhentikan Presiden apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi. Sikap yang di tunjukan mengeluarkan kecaman pada presiden untuk mundur padahal dalam konstitusi yang ada di dalam negara tersebut dimana pemimpin angkatan senjata tertinggi adalah presiden. Tetap dapat dilihat bahwa militer masih memposisikan dirinya seperti pemerintahan sementara.
2. Intervensi militer didukung oleh Amerika Serikat dengan memberikan bantuan politik dan ekonomi.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjawab perumusan masalah yang ada dengan fakta dan data
2. Untuk membutuhkan hipotesa yang sudah ada dengan konsep yang relevan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah dapat mengetahui faktor yang membuat transisi demokrasi di Mesir mengalami kegagalan, dan mengetahui bagaimana proses revolusi berlangsung sampai jatuhnya rezim Muhammad Mursi. Dalam skripsi ini penulis juga dapat di simpulkan bahwa masyarakat tidak merasa puas dengan kepemimpinan yang menyebabkan masyarakat berontak.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan dalam hipotesis dan latar belakang masalah. Mengingat topik penulisan kali ini sangat luas ruang lingkupnya, maka rentang waktu, geografis, dan lingkup permasalahan dibatasi pada peristiwa tersebut berdasarkan urutan waktu yang berlalu dan runtutan peristiwa yang terjadi maupun saat berlangsungnya Revolusi.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data cara studi pustaka, surat kabar, dan majalah. Tidak cukup kemungkinan data juga diperoleh melalui data elektronik yang akan di usahakan kevalidannya dengan fakta-fakta yang mendukung. Kemudian data ini diolah dan dianalisis guna membahas permasalahan yang ada.

I. Sitematika Penulisan

Pada Bab I penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis akan menjelaskan tentang Militer, Sistem Pemerintahan Mesir, Mesir Pada Masa Rezim Husni Mubarak, Arab Spring yang meliputi Revolusi Melati di Mesir serta Revolusi Mesir 2011 dan Mesir Pasca Runtuhnya Rezim Husni Mubarak.

Pada Bab III penulis akan memaparkan mengenai Awal mula Pemerintahan Muhammad Mursi, Mesir Pada Masa Pemerintahan Muhammad Mursi, Ketidakpuasan Masyarakat Mesir Terhadap Muhammad Mursi dan Lengsernya Presiden Muhammad Mursi.

Pada Bab IV penulis akan memaparkan mengenai peran militer dalam kegagalan demokratisasi di Mesir dengan faktor internal dan eksternal.

Pada Bab V Berisi tentang Kesimpulan, Penutup dan Referensi.